



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 41 TAHUN 2001

TENTANG

KODE WILAYAH, NOMENKLATUR / TITELATUR DAN KODE MASALAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi perkantoran sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan perubahan Struktur Organisasi dipandang perlu untuk mengatur Kode Wilayah, Nomenklatur / Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Bahwa untuk mengatur hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Kode Wilayah, Nomenklatur / Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Sidoarjo.
8. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR / TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Perangkat Daerah, adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Kode Wilayah adalah Nomor urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan ;
- f. Nomenklatur adalah Nama / Sebutan lembaga Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan ;
- g. Titelatur adalah Nama / Sebutan jabatan Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan ;
- h. Kode Masalah adalah nomor indeks permasalahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B A B II KODE WILAYAH

Pasal 2

Kode Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nomor urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan.

Pasal 3

Kode Wilayah dipergunakan untuk penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai identitas pengelolah naskah dinas.

Pasal 4

Kode Wilayah ditulis setelah penulisan nomor urut dan sebelum penulisan tahun pembuatan naskah dinas.

Pasal 5

Kode Wilayah diolah oleh Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

B A B III NOMENKLATUR

Pasal 6

Nomenklatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nama / sebutan lembaga Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain sesuai dengan struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Nomenklatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas asal pengolah naskah dinas.

Pasal 8

Nomenklatur diolah oleh Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

B A B IV TITELATUR

Pasal 9

Titelatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nama / sebutan jabatan Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Titelatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas penanggung jawab pengelola naskah dinas.

Pasal 11

Titelatur diolah oleh Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan daerah dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

B A B V KODE MASALAH

Pasal 12

Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nomor indeks permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kode Masalah dipergunakan dalam penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai induk / inti dari perihal dan isi keseluruhan naskah dinas.

Pasal 14

Kode Masalah ditulis pada awal penulisan nomor naskah dinas dan sebelum penulisan nomor urut naskah dinas.

Pasal 15

Kode Masalah diolah oleh Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan daerah dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah kabupaten Sidoarjo.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan - ketentuan yang mengatur tentang Kode Wilayah, Nomenklatur / Titelatur dan kode Masalah yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam keputusan ini, mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Bentuk dan susunan Kode Wilayah, Nomenklatur / Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II dan III keputusan ini.

Pasal 18

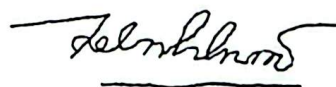
Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kode Wilayah, Nomenklatur / Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 Mei 2001

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARS

- 404.5.18.16 : Desa Glagaharum
404.5.18.17 : Desa Kesambi
404.5.18.18 : Desa Renokenongo
404.5.18.19 : Desa Wunut
- 404.6 : Perusahaan Daerah
- 404.6.1 : Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"
404.6.2 : Perusahaan Daerah Percetakan "Delta Grafika"
- 404.7 : Lembaga / Instansi lain di Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 30 Mei 2001

BUPATI SIDOARJO

td

| H. WIN HENDRARSO

NO.	NOMEN KLATUR (Sebutan Instansi)	TITELATUR (Sebutan Jabatan)	DASAR HUKUM
41.	- Desa.....	- Kepala Desa.....	- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
42.	- Sekretariat Desa...	- Sekretaris Desa.....	- Idem –
43.	- Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo.	- Direktur Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo.	- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978.
44.	- Perusahaan Daerah Percetakan "Delta Grafika" Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.	- Direktur Perusahaan Daerah Percetakan "Delta Grafika" Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.	- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 30 Mei 2001

BUPATI SIDOARJO

td

H. WIN HENDRARSO

973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
974	Retribusi
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan Bantuan Presiden
978	-
979	-
980	-
981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-
990	<u>BENDAHARAWAN</u>
991	SKPP
992	Teguran SPJ
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 30 Mei 2001

BUPATI SIDOARJO

td

H. WIN HENDRARSO